REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2016

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dilakukan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2011. Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN ditujukan untuk memberikan gambaran perkembangan pencapaian output kegiatan, dan realisasi penyerapan anggaran selama satu triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai identifikasi permasalahan, rencana tindak lanjut, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PHLN. Sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksanaan kegiatan PHLN secara lebih luas, beberapa contoh pembelajaran (*lesson learned*) dan replikasi kegiatan PHLN juga disampaikan dalam laporan ini.

Pada periode Triwulan I Tahun 2016, persentase penyerapan mencapai 13,7 persen. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 8,9 persen, dan bahkan lebih tinggi dari rata-rata penyerapan 5 tahun pada triwulan pertama, yaitu sebesar 12,2 persen. Meningkatnya kinerja penyerapan tersebut, antara lain disebabkan kenaikan persentase penyerapan yang cukup signifikan pada beberapa instansi, antara lain pada Kemenhan, Kepolisian RI, Kemenristekdikti, BPKP dan Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan kinerja dari masing-masing proyek, dalam Triwulan I Tahun 2016, terdapat 31 proyek yang memiliki kinerja dengan penyerapan cukup baik, yaitu mampu menyerap di atas 17,5 persen dari target penarikan pinjaman, dimana rata-rata penyerapan triwulan I dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 12,2 persen.

Meskipun secara umum kinerja proyek mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun lalu, namun dalam triwulan ini masih terdapat beberapa proyek dengan kinerja yang cukup rendah. Pada triwulan ini terdapat beberapa kendala antara lain dalam penerapan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) untuk *International Competitive Bidding* (ICB) yang masih memerlukan penyempurnaan sistem dan penyelarasan dengan sistem pengadaan barang/jasa mitra pembangunan (*development partners*). Telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengatasi kendala tersebut, sehingga diharapkan hal tersebut tidak menjadi kendala untuk triwulan berikutnya. Selain kendala penerapan sistem tersebut, kendala lain yang masih banyak ditemui pada triwulan ini adalah permasalahan pembebasan lahan.

Beberapa pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan PHLN diantaranya adalah perubahan pola kerja yang lebih efektif, inovasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara itu, dalam laporan ini juga disajikan contoh keberhasilan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil atau perbatasan yang berhasil direplikasi ke wilayah perbatasan lainnya menggunakan Rupiah Murni.

Perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan proyek PHLN perlu terus diupayakan, untuk dapat memastikan kemanfaatan proyek, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya, baik dari sisi perencanaan, persiapan pelaksanaan proyek, serta penyelesaian permasalahan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Di samping itu, pengetahuan atau pembelajaran-pembelajaran yang didapatkan selama siklus hidup proyek hendaknya dapat menjadi masukan, guna perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan selanjutnya, atau model yang didapatkan dapat disesuaikan dan dapat diperluas atau direplikasi dengan sumber pendanaan lainnya sehingga berdampak lebih besar bagi masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SOFYAN A. DJALIL

DAFTAR ISTILAH

ADB	:	*Asian Development Bank*
AFD	:	*Agence Francaise de Development*
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BP Batam	:	Badan Pengusahaan Batam
BPS	:	Badan Pusat Statistik
EU	:	*European Union*
IDB	:	*Islamic Development Bank*
IFAD	:	*International Fund for Agricultural Development*
JBIC	:	*Japan Bank for International Cooperation*
JICA	:	*Japan International Cooperation Agency*
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendes PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemen KP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemennaker	:	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemen PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kementan	:	Kementerian Pertanian
Kemen PPN/Bappenas	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemenhan	:	Kementerian Pertahanan
KSA	:	Kreditor Swasta Asing
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPKE	:	Lembaga Penjamin Kredit Ekspor
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*; perjanjian penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD /Pemerintah Daerah
PT. PII	:	PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PT. SMI	:	PT. Sarana Multi Infrastruktur

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri disusun berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan tersebut mencakup perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (tidak termasuk pinjaman program) dan kegiatan hibah yang direncanakan serta hibah langsung. Kurun waktu pemantauan proyek dilakukan mulai dari proyek efektif (*effective date*) sampai dengan proyek selesai (*closing date*).

GAMBARAN UMUM

Nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2016 (31 Maret 2016) sebesar ekuivalen USD 15.318,2 juta, terdiri dari 148 proyek yang dilaksanakan oleh 18 Kementerian/Lembaga, 4 BUMN dan 1 Pemerintah Daerah. Nilai pinjaman ini mengalami penurunan sebesar USD 844,1 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Penurunan ini disebabkan karena beberapa proyek pinjaman luar negeri telah selesai (*closed*) ataupun dibatalkan, sedangkan beberapa proyek yang sudah ditandatangani namun belum efektif, tidak termasuk dalam proyek yang sedang berjalan (*on going*) yang dipantau dan dicantumkan dalam laporan ini.

Jumlah pinjaman yang sudah terserap sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 adalah sebesar USD 7.266,5 juta atau mencapai 47,4 persen dari total nilai pinjaman yang sedang berjalan. Apabila dilihat dari kinerja penyerapan, realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 adalah USD 335,6 juta atau mencapai 13,7 persen dari target TA 2016 sebesar USD 2.456,5 juta. Persentase penyerapan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penyerapan lima tahun terakhir, yaitu 12,2 persen. Kemajuan kinerja penyerapan proyek selama satu triwulan ini berjalan dengan cukup baik, yang diindikasikan dengan adanya beberapa proyek yang mampu menyerap anggaran lebih dari 12,5 persen atau bahkan diatas 17,5 persen.

Dengan rata-rata penyerapan 13,7 persen tersebut, dari 148 proyek terdapat sekitar 36 proyek yang mampu mencapai realisasi penyerapan lebih dari 12,5 persen, bahkan terdapat 31 proyek yang mencapai kinerja di atas 17,5 persen selama satu triwulan. Namun demikian, masih terdapat beberapa proyek yang sangat rendah penyerapannya ataupun belum mengalami penyerapan (penyerapan nol).

Di samping merupakan awal tahun anggaran, rendahnya kinerja proyek juga disebabkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang sering muncul dan mengakibatkan rendahnya kinerja proyek tersebut diantaranya adalah kurang matangnya desain proyek (*Detail Engineering Design*/DED), permasalahan lambatnya proses pengadaan barang/jasa, dan permasalahan pembebasan lahan. Permasalahan pembebasan lahan tidak hanya disebabkan oleh sulitnya perijinan dan negosiasi ganti rugi warga terdampak, tetapi juga disebabkan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi.

Selain permasalahan tersebut, di awal tahun 2016 ini terdapat permasalahan baru, yaitu kendala dalam penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk *International Competitive Bidding* (ICB), terutama di Kementerian PUPR. SPSE dikembangkan oleh LKPP dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, sehingga seluruh ICB diarahkan untuk dapat disesuaikan dengan sistem nasional (*alignment*). Namun demikian, SPSE masih belum dapat mengakomodasi ketentuan yang disyaratkan pada ICB yang selama ini digunakan oleh mitra pembangunan. Oleh karena itu, saat ini disepakati adanya masa transisi, sehingga pelaksanaan ICB dapat menggunakan sistem yang ada sebelumnya sampai dengan SPSE telah disempurnakan.

Dalam laporan ini juga disampaikan kinerja pelaksanaan hibah luar negeri khususnya hibah yang direncanakan. Secara keseluruhan, terdapat 9 proyek hibah luar negeri dengan nilai USD 651,4 juta yang dilaksanakan oleh 2 Kementerian/Lembaga. Dari sisi pemanfaatan, hibah-hibah tersebut dialokasikan untuk lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*).

PINJAMAN LUAR NEGERI

1. PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2016

Pinjaman luar negeri dapat dilihat profilnya Berdasarkan pengelompokkan dalam sektor pembangunan, berdasarkan instansi penanggung jawab, dan berdasarkan pemberi pinjaman (*lender*). Melalui profil tersebut dapat dilihat mengenai komposisi pinjaman, nilai pinjaman, dan realisasi penyerapan pada Triwulan I Tahun 2016 dan perubahannya dibandingkan dengan satu triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama pada tahun 2015.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN ALOKASI SEKTORAL

Bila dikelompokkan dalam sektor pembangunan, pinjaman luar negeri terbagi ke dalam 5 sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Sektor lain-lain mencakup kesehatan, peningkatan teknologi (IT), pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Komposisi dan alokasi nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan sampai dengan Triwukan I Tahun 2016 berdasarkan sektor dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor

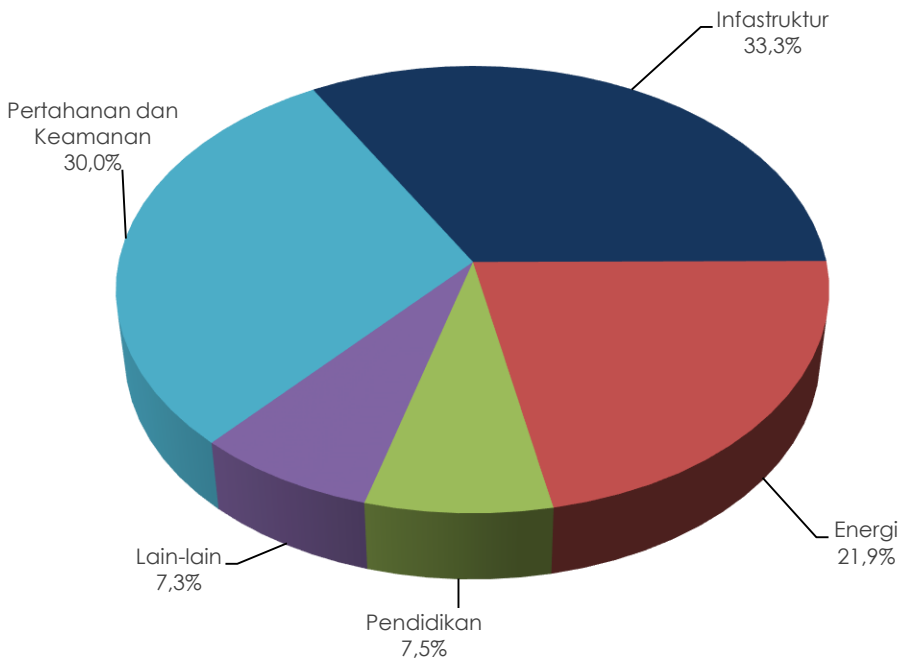

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2016 (diolah)

Pinjaman luar negeri dialokasikan sebagian besar untuk penyediaan infrastruktur dan energi, yaitu sekitar 55,2 persen. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur diantaranya untuk mencapai target air bersih dan sanitasi, serta pengembangan sarana transportasi dan perkeretaapian untuk mendukung konektivitas nasional. Sedangkan pinjaman luar negeri di sektor energi diarahkan pada pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah di Indonesia dan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW di tahun 2019. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya. Alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri.

Komposisi pinjaman secara sektoral tidak mengalami perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2015. Namun, bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Triwulan I Tahun 2015), terdapat kenaikan komposisi pinjaman di sektor pertahanan dan keamanan yaitu dari 26,8 persen pada Triwulan I Tahun 2015 menjadi 30 persen pada triwulan ini. Selain itu, dalam periode yang sama, komposisi pinjaman di sektor energi juga sedikit mengalami peningkatan dari 21,3 persen menjadi 21,9 persen. Di sisi lain, komposisi pinjaman di sektor infrastruktur mengalami penurunan sekitar 3 persen, dari 36,3 persen menjadi 33,3 persen. Penurunan ini disebabkan oleh adanya proyek-proyek di sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan, serta infrastruktur perkotaan yang sudah selesai (*closed*) di tahun 2015.

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor

(Ekuivalen Juta USD)

Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Infrastruktur	44	5.094,7	2.668,9	52,4	2.425,8	859,4	62,8	7,3
Energi	17	3.351,1	547,4	16,3	2.803,7	487,3	23,4	4,8
Pendidikan	15	1.155,4	338,7	29,3	816,8	210,1	26,6	12,7
Pertahanan dan Keamanan	58	4.597,0	3.223,0	70,1	1.373,9	609,7	208,9	34,3
Lain-lain	14	1.119,9	488,5	43,6	631,4	290,0	14,0	4,8
Total	**148**	**15.318,2**	**7.266,5**	**47,4**	**8.051,6**	**2.456,5**	**335,6**	**13,7**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2016 (diolah)

Secara umum realisasi penyerapan pada triwulan ini menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2015, yaitu meningkat dari 8,9 persen menjadi 13,7 persen. Berdasarkan data di tabel 2.1, sektor pertahanan dan keamanan memiliki kinerja penyerapan yang cukup tinggi, yaitu mampu menyerap 34,3 persen dari target penyerapan di tahun 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 13,6 persen. Disamping itu, kinerja di sektor pendidikan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 5,6 persen pada Triwulan I Tahun 2015, menjadi 12,7 persen pada triwulan ini. Sebaliknya, kinerja penyerapan di sektor lain-lain masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama sebesar 5,6 persen, sedangkan di tahun 2016 hanya mencapai 4,8 persen. Penurunan kinerja sektor lain-lain terutama disebabkan karena beberapa proyek yang memiliki kinerja tinggi pada periode yang sama di tahun lalu seperti pada Kementerian Keuangan, dan BMKG telah selesai (*closed*). Sedangkan untuk sektor infrastruktur dan energi memiliki kinerja yang relatif hampir sama dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun lalu.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Dalam gambar 2.2. dapat dilihat komposisi pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggungjawab. Proporsi terbesar berada di Kemenhan, Kementerian PUPR dan PT PLN. Meskipun demikian, terdapat sedikit perubahan komposisi pinjaman selama triwulan ini, yaitu naiknya komposisi pinjaman pada Kementerian PUPR dari 25,2 persen pada Triwulan IV 2015 menjadi 25,7 persen di Triwulan I 2016, sedangkan Kemenhub mengalami peningkatan dari 3,9 persen menjadi 4 persen pada periode yang sama. Sedangkan untuk Kemendes PDTT mengalami peningkatan dari 3 persen menjadi 3,4 persen. Untuk instansi lainnya tidak mengalami perubahan yang berarti dari sisi komposisi nilai pinjaman. Dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun lalu, komposisi pinjaman pada masing-masing instansi penanggung jawab masih relatif sama, dimana nilai pinjaman terbesar berada pada Kemenhan, Kementerian PUPR, dan PT. PLN. Namun, yang berbeda adalah dialihkannya proyek Kemendagri di awal tahun ini kepada Kemendes PDTT, yaitu *IFAD Support to PNPM* senilai 63,2 juta.

Gambar 2.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

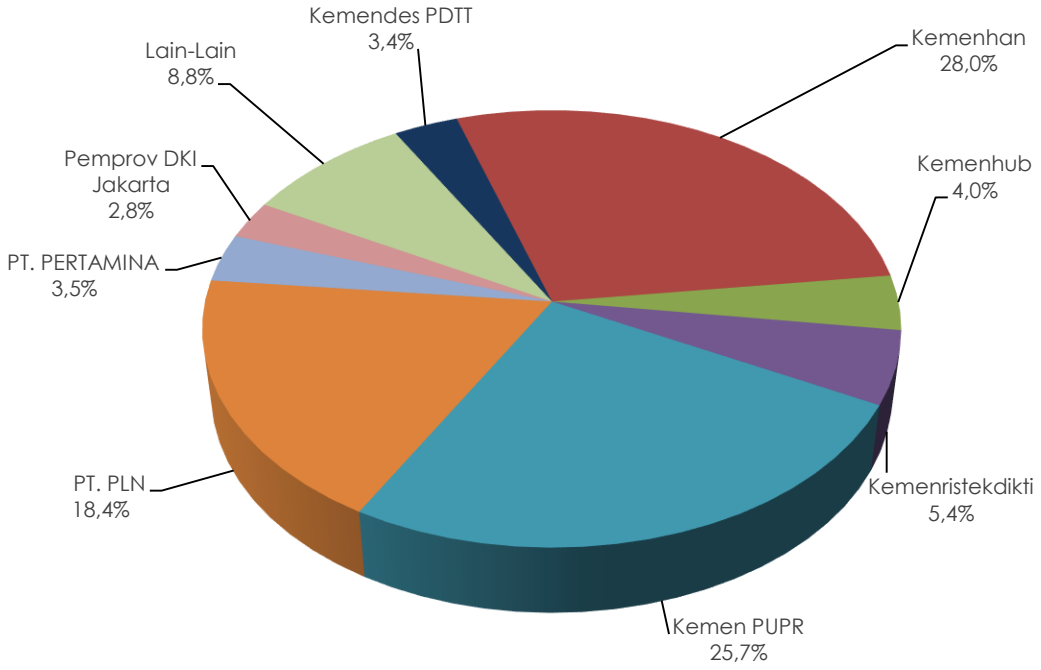

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.2, maka apabila dilihat dari nilai pinjaman, terdapat penurunan nilai pinjaman yang cukup besar dari Triwulan I Tahun 2015 ke Triwulan I Tahun 2016, yaitu turun sebesar USD 844,1 juta. Penurunan nilai pinjaman cukup signifikan terjadi di Kemenhub (turun USD 511 juta), Kementerian PUPR (turun USD 288,9 juta), PT. PLN (turun USD 110,9 juta), Bappenas (turun USD 104,5 juta), dan Kementerian Kominfo (turun USD 21,9 juta) . Penurunan ini sebagian besar disebabkan adanya proyek-proyek yang telah selesai (*closing*) atau dibatalkan selama tahun 2015. Di Kemenhub terdapat 1 proyek selesai dan 2 proyek yang dibatalkan, sedangkan di Kementerian PUPR terdapat 3 proyek yang telah selesai dan 1 proyek yang dibatalkan. Sementara itu, di PT. PLN dan Bappenas masing-masing terdapat 2 proyek yang telah selesai, dan di Kementerian Kominfo terdapat 1 proyek yang telah selesai.

Tabel 2.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kementerian/Lembaga	**128**	**11.433,8**	**6.344,7**	**55,5**	**5.089,1**	**1.767,9**	**303,1**	**17,1**
BIG	1	56,7	55,7	98,1	1,1	0,0	0,0	0,0
BPKP	1	57,8	24,1	41,7	33,7	19,5	3,9	20,1
BP Batam	1	46,7	2,4	5,2	44,3	12,4	0,0	0,0
BPS	1	47,0	2,9	6,1	44,1	12,1	0,6	4,8
Kemenag	2	128,4	0,2	0,1	128,2	13,7	0,0	0,2
Kemendes PDTT	2	513,2	250,8	48,9	262,4	129,9	7,7	5,9
Kemen KP	3	166,9	68,9	41,3	98,0	25,5	0,8	3,2
Kemennaker	1	32,5	0,1	0,3	32,4	27,5	0,1	0,3
Kemenkominfo	1	54,5	23,0	42,2	31,5	23,0	0,0	0,0
Kemen PUPR	36	3.941,5	2.163,9	54,9	1.777,5	547,0	53,5	9,8
Kemendikbud	1	21,6	9,4	43,7	12,1	2,1	0,0	0,0
Kemenhub	5	620,0	130,5	21,1	489,5	111,0	0,1	0,1
Kementan	2	127,9	50,1	39,2	77,8	34,6	0,9	2,7
Kemen PPN/Bappenas	2	175,6	82,3	46,9	93,3	29,7	4,5	15,1
Kemenristekdikti	10	829,9	246,7	29,7	583,2	164,6	22,1	13,4
Kepolisian RI	17	304,7	186,3	61,2	118,4	110,0	33,4	30,3
Kemenhan	41	4.292,3	3.036,7	70,7	1.255,6	499,7	175,5	35,1
LIPI	1	16,7	10,5	62,8	6,2	5,7	0,0	0,0
Diteruspinjamkan (SLA)	**19**	**3.455,7**	**649,0**	**18,8**	**2.806,8**	**488,4**	**23,4**	**4,8**
PT. PII	1	4,6	1,7	36,5	2,9	1,2	0,0	0,0
PT. PERTAMINA	2	540,1	88,2	16,3	451,9	193,7	6,8	3,5
PT. PLN	15	2.811,1	459,2	16,3	2.351,9	293,6	16,6	5,6
PT. SMI	1	100,0	99,9	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0
Diterushibahkan	**1**	**428,6**	**272,9**	**63,7**	**155,7**	**200,2**	**9,2**	**4,6**
Pemprov. DKI Jakarta	1	428,6	272,9	63,7	155,7	200,2	9,2	4,6
Total	**148**	**15.318,2**	**7.266,5**	**47,4**	**8.051,6**	**2.456,5**	**335,6**	**13,7**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan instansi penanggung jawab, pelaksanaan pinjaman luar negeri dapat dikelompokkan menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, diteruspinjamkan (SLA), dan diterushibahkan. Dibandingkan dengan kinerja penyerapan tahun lalu (Triwulan I Tahun 2015), beberapa instansi penanggung jawab proyek mengalami penurunan kinerja penyerapan pada triwulan ini, diantaranya Kemenhub, Kemenag, Kemen KP, BP Batam, dan PT. Pertamina. Namun demikian, apabila dilihat kinerja masing-masing proyek dalam instansi tersebut, terdapat beberapa proyek yang memiliki kemajuan cukup berarti di awal tahun ini. Sebagai contoh, realisasi penyerapan pada proyek *Lumut Balai Geothermal Power Plant Project* di PT. Pertamina mampu menyerap 2,1 persen dari target TA 2016, yang pada periode yang sama di tahun lalu belum melakukan penyerapan. Hal ini menunjukkan bahwa variasi kinerja proyek dalam satu instansi penanggung jawab cukup beragam. Selain terjadi penurunan, dalam Triwulan I Tahun 2016 juga terdapat 3 instansi penanggungjawab yang memiliki tingkat penyerapan cukup tinggi di atas 17,5 persen, yaitu Kemenhan, Kepolisian RI, dan BPKP.

Berdasarkan *progress* kinerja penyerapan selama satu triwulan, yang dihitung berdasarkan selisih penyerapan kumulatif antara Triwulan IV Tahun 2015 dan Triwulan I Tahun 2016, terdapat *progress* kenaikan realisasi penyerapan kumulatif yang cukup signifikan pada proyek PNPM ICDD Phase III di Kemen PUPR, yaitu meningkat dari 69,3 persen pada Triwulan IV Tahun 2015 menjadi 79,4 persen pada Triwulan I Tahun 2016. Sedangkan penyerapan terhadap target TA 2016 dari proyek tersebut mencapai 71,1 persen. Sementara itu, kemajuan juga ditunjukkan pada proyek *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Project* yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Proyek ini mengalami *progress* penyerapan yang cukup signifikan dalam satu triwulan ini, yaitu secara kumulatif meningkat sebesar 2,2 persen dari 61,5 persen (Triwulan IV Tahun 2015) menjadi 63,7 persen (Triwulan I Tahun 2016). Peningkatan ini disebabkan oleh semakin meningkatnya pekerjaan fisik yang sampai dengan triwulan ini sudah mencapai 32 persen, meskipun masih terdapat sekitar 40 persen lahan yang belum dibebaskan.

Selain terjadi kenaikan realisasi, dalam triwulan ini juga masih terdapat beberapa instansi yang memiliki proyek dengan kinerja yang rendah atau bahkan belum memiliki *progress* penyerapan selama Triwulan I Tahun 2016, diantaranya adalah LIPI dan BP Batam. Proyek *Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production* di LIPI masih terkendala oleh proses pengiriman barang dari Singapura. Contoh lain adalah permasalahan yang terjadi di proyek *Development of Sewerage System in Batam Island* di BP Batam yang masih menunggu persetujuan penetapan pemenang lelang. Adanya perubahan kepemimpinan di internal BP Batam menyebabkan proses penetapan pemenang lelang mengalami penundaan. Selain dua Instansi tersebut, terdapat beberapa proyek dengan kinerja yang rendah atau penyerapan nol yang terjadi di beberapa proyek, antara lain proyek *Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurposes Dam Reservoir II*, *Metropolitan Sanitation Management Investment Project* (MSMHP), dan *Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta* di Kementerian PUPR, *Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line* dan *Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I* di Kemenhub, serta *Indramayu Coal Fired Power Plant Project* (E/S) dan *Scattered Transmission and Substation Project* di PT. PLN.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

Sumber pinjaman dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan saat ini berasal dari 3 kelompok, yaitu Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE), Kreditor Multilateral, dan Kreditor Bilateral,

Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti BNP Paribas, *Exim Bank of Korea*, *Export-Import Bank of China*, dan *Fortis Bank Belanda*.

Kreditor Mutilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara. Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing.

Gambar 2.3 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

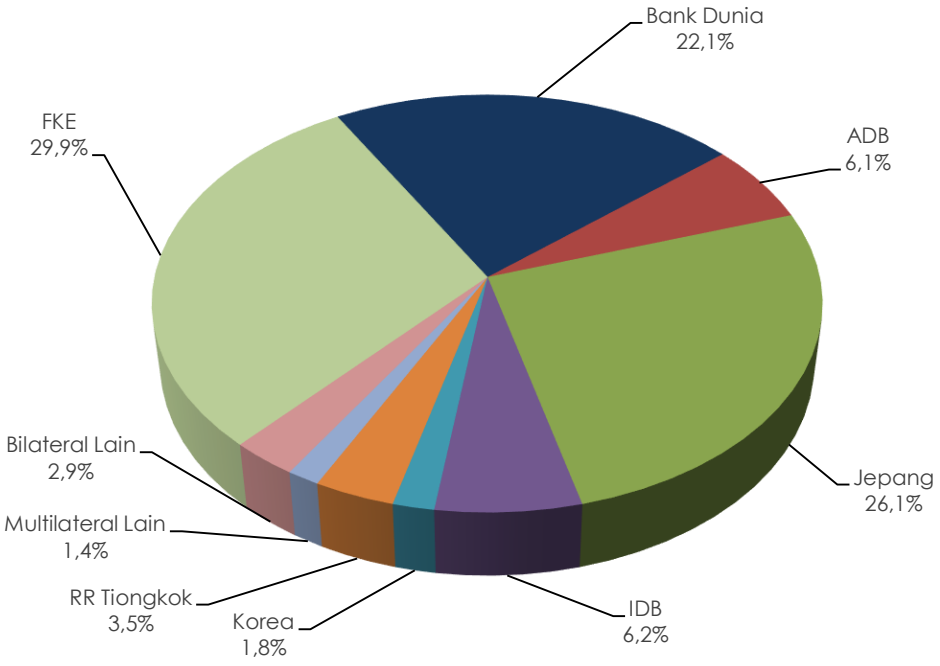

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2016 (diolah)
Keterangan:
- *Pinjaman Multilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund*
- *Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Australia, Jerman, Perancis, dan Spanyol*

Lebih dari 75 persen dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) berasal dari FKE, Jepang dan Bank Dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3, Sedangkan sepertiganya terbagi ke dalam beberapa kreditor bilateral dan multilateral. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Triwulan I Tahun 2015), terdapat perubahan yaitu menurunnya komposisi pinjaman Jepang dari 27,8 persen pada Triwulan I Tahun 2015 menjadi 26,1 persen pada Triwulan I Tahun 2016. Sebaliknya, pada rentang periode yang sama, terjadi kenaikan proporsi pinjaman FKE dari 26,6 persen menjadi 29,9 persen, dan pinjaman Bank Dunia dari 21,3 persen menjadi 22,1 persen. Untuk komposisi pada pemberi pinjaman lain tidak mengalami banyak perubahan, kecuali untuk proporsi pinjaman ADB yang turun dari 6,9 persen menjadi 6,1 persen, dan proporsi pinjaman bilateral lain yang turun cukup signifikan dari 4,8 persen menjadi 2,9 persen.

Dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2015, pada triwulan ini nilai pinjaman mengalami sedikit kenaikan. Dilihat dari Tabel 2.3 secara total jumlah pinjaman senilai USD 15.318,2 juta mengalami kenaikan sebesar USD 110,7 juta dari triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penguatan beberapa mata uang asing terhadap USD. Di samping itu, terdapat beberapa pemberi pinjaman yang mengalami penurunan dari akhir tahun 2015, yaitu Bank Dunia, ADB, IDB, Korea, Jerman dan Perancis. Penurunan nilai pinjaman terbesar terjadi pada pinjaman ADB yang turun mencapai USD 77,6 juta, disusul oleh Bank Dunia dengan penurunan nilai pinjaman sebesar USD 49,9 juta, sedangkan IDB turun USD 30,4 juta, Perancis turun USD 26,7 juta, dan Korea turun sekitar USD 12,7 juta. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penurunan nilai pinjaman tersebut disebabkan adanya beberapa proyek yang sudah selesai (*closed*).

Tabel 2.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

(Ekuivalen Juta USD)

No	Sumber Pinjaman	Jumlah *Loan*	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
						Target	Realisasi	%
I	**Kreditor Multilateral**	**56**	**5.502,5**	**1.651,0**	**3.851,5**	**1.033,6**	**73,4**	**7,1**
	Bank Dunia	18	3.392,2	1.100,5	2.291,7	649,8	30,9	4,8
	ADB	13	937,1	196,5	740,6	161,4	15,3	9,5
	IDB	20	957,1	229,9	727,2	199,4	26,9	13,5
	IFAD	3	145,1	107,8	37,3	20,9	0,3	1,5
	Saudi Fund	2	71,0	16,3	54,7	2,2	0,0	0,0
II	**Kreditor Bilateral**	**52**	**5.233,8**	**2.393,2**	**2.840,7**	**842,8**	**53,3**	**6,3**
	Jepang	33	3.992,3	1.926,0	2.066,3	660,4	43,9	6,6
	Jerman	3	143,8	34,8	108,9	4,8	0,0	0,0
	Korea	5	272,5	37,1	235,4	70,8	3,3	4,7
	Perancis	5	276,6	81,2	195,4	35,7	0,0	0,0
	RR Tiongkok	5	531,9	303,5	228,4	65,4	6,1	9,4
	Spanyol	1	16,7	10,5	6,2	5,7	0,0	0,0
III	**KSA/LPKE**	**59**	**4.581,9**	**3.222,4**	**1.359,5**	**580,1**	**208,9**	**36,0**
	Total	**167**	**15.318,2**	**7.266,5**	**8.051,6**	**2.456,5**	**335,6**	**13,7**

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2016 (diolah)

Kinerja realisasi penyerapan pada Triwulan I Tahun 2016 mencapai 13,7 persen yang disumbang oleh kinerja proyek KSA/LPKE sebesar 36 persen, Kreditor Multilateral sebesar 7,1 persen dan Kreditor Bilateral sebesar 6,3 persen. Pada triwulan ini, kinerja tertinggi untuk Kreditor Multilateral terdapat pada IDB dan ADB, yang masing-masing mencapai 13,5 persen dan 9,5 persen. Sedangkan pada Kreditor Bilateral, kinerja tertinggi terdapat pada RR Tiongkok dan Jepang, yaitu mencapai 9,4 persen dan 6,6 persen. Namun demikian, masih terdapat beberapa sumber pinjaman dengan kinerja proyek nol (0) persen, yaitu Jerman, Perancis, Spanyol dan Saudi Fund.

❖ REKAPITULASI PROYEK TUTUP DAN BARU DI TRIWULAN I TAHUN 2016

Pada Tabel 2.4 dapat dilihat beberapa proyek yang telah selesai (*closed*) dalam satu triwulan ini sehingga dikeluarkan dari pemantauan pada Triwulan I 2016.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Proyek Tutup di Triwulan I Tahun 2016

(Ekuivalen Juta USD)

No	Nama/Jumlah Proyek	Instansi Penanggung Jawab	Lender	Nilai Pinjaman
Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Berakhir Masa Berlakunya				
1	*Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacitiy*	BMKG	Perancis	32,9
2	*The Development and Quality Improvement of State Intitute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel Project (1 loan)*	Kemenag	IDB	30,4
3	*The Improvement of the Moh. Hoesin Hospital*	Kemenkes	Jerman	12,3
4	*Strengthening of Teaching Hospitals*	Kemenkes	Korea	20,2
5	*Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP)*	Kemenkeu	Bank Dunia	60,0
6	*Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)*	Bappenas	ADB	27,6
7	*Java-Bali Electricity Distribution Performance Improvement*	PT. PLN	ADB	50,0
8	2 Proyek	Kemenhan		

2. RINGKASAN KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2016

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan ini mencapai 13,7 persen dari target anggaran tahun 2016. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, persentase realisasi penyerapan dalam triwulan ini mengalami kenaikan sebesar 4,8 persen. Kenaikan ini lebih dipengaruhi oleh naiknya realisasi penyerapan pada proyek-proyek KSA/LPKE, sedangkan untuk proyek-proyek *softloan* dari Kreditor Bilateral dan Kreditor Multilateral relatif hampir sama. Variasi setiap proyek sangat beragam, dimana terdapat proyek yang memiliki kinerja penyerapan cukup baik, bahkan mencapai 17,5 persen dari target penyerapan, sebaliknya terdapat beberapa proyek yang belum mengalami penyerapan atau tidak memiliki pergerakan dari mulai efektif sampai dengan Triwulan I Tahun 2016.

Gambar 2.4 Kinerja Penyerapan TA 2016 Berdasarkan Nilai Pinjaman dan Jumlah Proyek

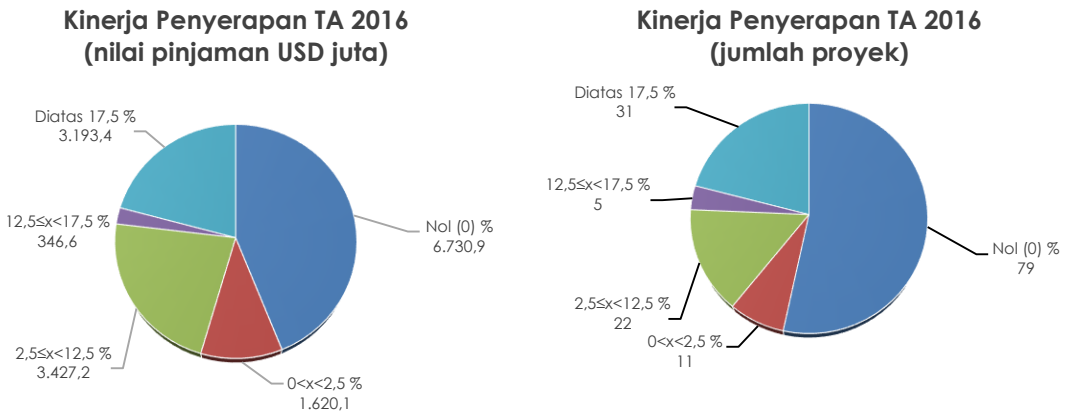

Sumber: *Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan I Tahun 2016 (diolah)*

Bila dilihat dari kinerja penyerapan, secara umum terdapat sekitar 31 proyek yang memiliki kinerja penyerapan baik yang mampu menyerap di atas 17,5 persen dari target TA 2016. Dilihat dari sisi nilai pinjaman, 31 proyek tersebut bernilai USD 3.193,4 juta atau 20,8 persen dari total nilai pinjaman sebesar USD 15.318,2 juta. Sekitar 90 proyek mengalami kinerja yang sangat lambat dan hanya mampu menyerap di bawah 2,5 persen terhadap target TA 2016. Diantara proyek-proyek tersebut, terdapat proyek yang mengalami penyerapan nol (0) atau bahkan belum menunjukkan adanya penyerapan proyek sejak dinyatakan efektif. Perhatian khusus perlu dilakukan pada proyek-proyek tersebut antara lain dengan melakukan pertemuan intensif dan mempercepat proses reviu terhadap rencana pelaksanaan proyek.

Di awal Triwulan I Tahun 2016 ini terdapat permasalahan yang baru terjadi di tahun 2016. Permasalahan baru tersebut yaitu penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk pengadaan yang menggunakan *International Competitive Bidding* (ICB). Penggunaan SPSE untuk ICB tersebut belum disepakati oleh mitra pembangunan karena belum memenuhi ketentuan ICB masing-masing mitra pembangunan. Permasalahan ini berpotensi menghambat proses pengadaan pada beberapa proyek, misalnya *Western Indonesia National Roads Improvement* (WINRIP), PAMSIMAS III, dan *Emission Reduction in Cities: Solid Waste Management*. Penyelesaian permasalahan terus dilakukan, dan diharapkan dapat diselesaikan pada triwulan selanjutnya.

Beberapa permasalahan lainnya juga masih terjadi dalam triwulan ini. Permasalahan pertama terkait dengan revisi desain (DED) proyek, yang dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek karena adanya perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada ruang lingkup proyek, nilai proyek, dan lokasi. Permasalahan kedua adalah lambatnya proses pengadaan barang/jasa yang antara lain disebabkan oleh lamanya reviu dokumen lelang, lamanya penerbitan NOL, dan tidak adanya penawaran yang masuk (gagal lelang). Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait pengadaan lahan baik yang disebabkan karena proses perijinan, maupun terkait dengan isu permukiman kembali, dan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi. Disamping permasalahan tersebut diatas, masalah administrasi seperti kekurangan alokasi DIPA, keterlambatan penerbitan *Withdrawal Application* (WA) dan pengesahan (SP3) juga masih sering terjadi.

3. *LESSON LEARNED* PELAKSANAAN PROYEK

Pada Triwulan I Tahun 2016 ini terdapat beberapa proyek yang bisa dijadikan pembelajaran. Dalam laporan ini, dipaparkan 2 contoh proyek yang berhasil dan dapat memberikan pembelajaran. Proyek tersebut adalah proyek yang telah selesai yaitu, *Strengthening BMKG Climate and Weather Service Capacity yang* dikelola BMKG, dan proyek yang sedang berjalan *yaitu Denpasar Sewerage Development Project II* yang dikelola oleh Kementerian PUPR.

Strengthening BMKG Climate and Weather Service Capacity

Proyek *Strengthening BMKG Climate and Weather Service Capacity* yang dibiayai Natixis Perancis mulai efektif pada 27 November 2012 dan berakhir pada 29 November 2015 dengan nilai pinjaman EUR 30,3 juta. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim yang lebih cepat, akurat, mudah dimengerti dan memiliki jangkauan yang luas. Sertifikasi penyelesaian proyek telah ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 di Paviliun Indonesia pada COP21 Paris dan disaksikan oleh Menteri Luar Negeri RI.

Secara garis besar proyek ini mempunyai tiga komponen utama, yaitu Sistem Pengamatan Cuaca (*Observation System*), Sistem Teknologi Informasi (*Information Technology System*) dan Layanan Lintas Sistem (*Transversal Services*). Hasil-hasil yang didapat dari proyek ini antara lain:

Gambar 2.5 Ruang Operasional BMKG Pusat dan Peralatan Pengamatan Cuaca

1. Peningkatan kerapatan jaringan pengamatan cuaca BMKG melalui pemasangan *Automatic Weather Station* (AWS), pengamatan udara atas (*Rason*), *Wind Profiler* dan pengamatan cuaca di laut (*Voluntary Observing Ship*).
2. Penambahan jumlah dan jenis data model numerik yang dijadikan dasar untuk pembuatan prakiraan cuaca yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan akurasi prakiraan cuaca.
3. Peningkatan jumlah dan jenis layanan serta perluasan jangkauan layanan melalui pembangunan *End User Production System* yang mendukung diseminasi info cuaca secara otomatis ke berbagai moda komunikasi seperti website, email, *mobile application*, stasiun TV dan *public display*.
4. Penambahan produk layanan baru diantaranya informasi kejadian petir dan peta peringatan dini cuaca dengan menggunakan kode warna.
5. Standarisasi produk layanan sesuai ketentuan Badan Meteorologi Dunia (WMO) melalui penerapan format *Common Alert Protocol* (CAP) dan WMO *Information System* (WIS).
6. Peningkatan kecepatan dan keamanan sistem komunikasi data melalui pembangunan *Automatic Message Switching System* (AMSS).
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia BMKG melalui rangkaian kegiatan pelatihan, baik pelatihan singkat (*system training*) maupun jangka panjang (*master degree scholarship*).

Pembelajaran yang dapat diperoleh dari proyek *Strengthening BMKG Climate and Weather Service Capacity* adalah perlunya perubahan alur kerja operasional sehari-hari mengikuti cara kerja peralatan/sistem baru yang digunakan. Perubahan tersebut mutlak perlu dilakukan karena beberapa peralatan/sistem yang dipasang merupakan peralatan/sistem baru yang belum pernah dioperasikan sebelumnya oleh BMKG. Beberapa perubahan dimaksud antara lain:

1. Penerapan konsep *Senior Forecaster* yang bertugas memberikan bimbingan teknis prakiraan cuaca harian secara nasional melalui pembuatan *Technical Guidance*.
2. Pembuatan informasi cuaca berbasis dampak (*Impact Based Forecast*).
3. Penerapan konsep prakiraan cuaca digital secara nasional (*National Digital Forecast*) dimana seluruh kantor BMKG propinsi membuat prakiraan cuaca propinsinya masing-masing dengan menggunakan *tools* yang sama dan mengacu pada *guidance* nasional yang dikeluarkan oleh *Senior Forecaster* dengan batas waktu produksi yang sama.

4. Proses produksi dan diseminasi informasi cuaca yang otomatis dan terintegrasi, yaitu dengan melakukan satu kali proses produksi, maka produk-produk tersebut dapat terkirim ke berbagai moda diseminasi seperti website, email, stasiun TV, *mobile application* dan *public display*.
5. Pengenalan teknologi baru dalam operasional pengamatan cuaca, yaitu dengan menerapkan teknologi elektrolisa air untuk pembuatan gas hidrogen untuk pengamatan udara atas (*Rason*). Selama ini BMKG selalu membeli gas hidrogen atau membuatnya dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Dengan teknologi elektrolisa air ini maka bahan yang dibutuhkan hanya air bersih.
6. Sistem-sistem yang dibangun melalui proyek ini memungkinkan BMKG untuk memberikan layanan informasi cuaca dan iklim dengan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa (*user oriented product*). Hal ini dimungkinkan karena sistem-sistem pada sisi produksi dan diseminasi dapat mengakomodir proses produksi dan disemiansi sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Contohnya produk untuk melayani PT. PELNI dirancang khusus untuk mendukung operasional PT. PELNI, begitu pula produk untuk Basarnas dirancang untuk mendukung proses SAR.

Denpasar Sewerage Development Project (DSDP II)

Proyek *Denpasar Sewerage Development Project (DSDP II)* yang dibiayai JICA (Jepang) mulai efektif pada 25 Juli 2008 dan akan berakhir pada 25 Juli 2016 dengan nilai pinjaman JPY 6.004 juta. Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan area pelayanan (815 hektar) sistem pengelolaan air limbah terpusat (*sewerage system*) di Denpasar, Kuta, dan Sanur dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan perairan (pantai, sungai dan air tanah).

Gambar 2.6 IPAL Suwung, Kolam Aerasi, dan Kolam Sedimen

Ruang lingkup pekerjaan dari proyek DSDP II meliputi konstruksi jaringan pipa utama dan sekunder/tersier, pengadaan dan instalasi peralatan, instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), *inflow pump*, *aerator*, *generator*, *flow-meter* dan *water supply system*, serta *equipment* terkait lainnya seperti *mainhole* dan *wet pit*. Pelaksanaan pekerjaan DSDP II dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu porsi Pemerintah Pusat adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), jaringan pipa utama hingga tersier, dan *public campaign*. Sedangkan porsi Pemerintah Daerah adalah Sambungan Rumah (SR) dan pengelolaan UPT.

Beberapa pembelajaran yang dapat diperoleh dari proyek *Denpasar Sewerage Development Project (DSDP II)* adalah sebagai berikut:

1. Teknologi.
   - Implementasi "*Clean Construction*" secara konsisten, yaitu menerapkan sistem penggalian tanah dimana setiap galian tanah tidak ditempatkan di sisi galian, melainkan dibawa ke tempat penampungan sementara (*stock yard*), yang pada gilirannya akah dipilah untuk bahan penimbunan kembali. Lokasi kerja sekitar galian juga tetap ditata dengan baik termasuk pemasangan papan barikade dan rambu-rambu pengaman kerja. Hal tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan kepedulian dari pihak proyek terhadap kenyamanan masyarakat.
   - Penerapan sistem "*Trench-less*" dengan menggunakan teknologi "*Jacking Pipe*" sangat efektif untuk area padat lalu lintas dan pusat pelayanan wisata seperti area Legian dan Kuta, sehingga dapat meminimalkan gangguan terhadap aktifitas pariwisata. Sistem ini memang

sangat direkomendasikan untuk pekerjaan pemasangan pipa di daerah padat lalu lintas, padat utilitas bawah tanah, area pusat bisnis dan kedalaman pipa diatas empat meter.

- Pengaturan lalu lintas (*traffic management*) selama masa pelaksanaan proyek juga dilakukan melalui koordinasi yang sangat baik dengan semua instansi terkait, pengumuman jadwal konstruksi melalui media massa, penempatan rambu-rambu pengatur lalu lintas dan penempatan "*Signal Man*" (tenaga pengatur lalu lintas yang dilatih dari pemuda setempat). Hal tersebut dapat meminimalkan dampak negatif terhadap ketidaknyamanan masyarakat.

2. Proses Pembentukan Kelembagaan.
   - Pada awalnya dibentuk BLU-PAL (Badan Layanan Umum Pengelolaan Air Limbah) sebagai pengelola *sewerage system* yang telah dibangun melalui proyek DSDP I. Terdapat *sharing* untuk operasional dan pemeliharaan melalui pengelolaan oleh BLU-PAL yang ditanggung bersama oleh Pemprop Bali, Pemkot Denpasar, dan Pemkab Badung (wilayah Kuta dan Sanur).
   - Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelembagaan pengelola tersebut harus berbentuk UPT (Unit Pelayanan Teknis) terlebih dahulu, dan pembiayaan untuk operasional dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab Propinsi (peraturan perundangan tersebut terbit setelah pembentukan BLU-PAL). Sehingga BLU-PAL yang telah terbentuk diubah menjadi UPT Propinsi (di bawah Dinas Pekerjaan Umum) dengan pembiayaan dari Pemerintah Propinsi. Saat ini UPT Propinsi tersebut sedang dalam proses untuk menjadi BLU Daerah.
   - Kebijakan kelembagaan pengelola limbah berbeda untuk setiap daerah. Sebagai contoh di Bali dikelola oleh Pemerintah Propinsi melalui UPT Propinsi, sedangkan di Kota Bandung Jawa Barat dikelola oleh PDAM yang meliputi air bersih dan air limbah.
3. *Sharing* Pemerintah Daerah.
   - Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tanggung jawab Pemerintah Pusat terkait *sewerage system* meliputi IPAL dan jaringan pipa utama hingga tersier. Pada proyek ini, pembangunan jaringan utama hingga tersier menggunakan pinjaman JICA yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
   - Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemasangan Sambungan Rumah (SR). *Sharing* pembiayaan dengan Pemerintah Daerah dalam hal pemasangan SR tersebut menjadikan Pemerintah Daerah mempunyai kepemilikan (*ownership*) yang kuat atas proyek. Hal tersebut juga menjadi insentif bagi masyarakat karena selama pelaksanaan proyek, pembiayaan pemasangan SR digratiskan bagi masyarakat (dibiayai APBD). Biaya pemasangan SR sekitar Rp 6 juta/rumah. Terbatasnya APBD yang dimiliki Pemerintah Daerah menyebabkan alokasi untuk biaya pemasangan SR tidak lebih dari Rp 15 miliar/tahun. Dengan alokasi tersebut, pemasangan SR direncanakan akan selesai pada tahun 2016.
   - Selain koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, koordinasi dan kerja sama yang intensif antar Pemerintah Daerah (Propinsi Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung) juga sangat penting, mengingat letak lokasi pemasangan pipa air limbah DSDP ini berada pada wilayah kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Hal tersebut tidak saja berpengaruh pada saat masa konstruksi tetapi lebih utama lagi dalam hal pembentukan dan perkuatan lembaga pengelola seperti UPT-PAL Bali. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar lembaga Pemerintah Daerah tentunya akan berdampak langsung terhadap keberlanjutan lembaga pengelola tersebut untuk mengoperasikan sistem DSDP dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.
4. Retribusi.
   - Penentuan tarif dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Penentuan tarif di Bali menggunakan subsidi silang, yaitu untuk pelanggan non rumah tangga/bisnis (hotel, restoran, dan lainnya) dikenakan tarif lebih mahal dibandingkan dengan pelanggan rumah tangga. Biaya retribusi dari pelanggan tersebut cukup untuk membiayai operasional dan pemeliharaan *sewerage system*.
   - Aspek kelembagaan juga berpengaruh terhadap *enforcement* pembayaran retribusi. Sebagai contoh, di kota Bandung - Jawa Barat, di bawah kelembagaan yang sama untuk pengelolaan air bersih dan air limbah, retribusi dilakukan dalam satu paket pembayaran yang sama. Dengan sistem ini, jika pelanggan tidak membayar retribusi, maka pelayanan untuk air

bersih dapat dihentikan (aliran air bersih dapat diputus dalam jaringan). Saat ini, kelembagaan pengelolaan air bersih dan limbah di Bali dilakukan secara terpisah. Rencananya akan segera diintegrasikan dengan PT. PLN, sehingga pembayaran listrik dan retribusi bisa dilakukan dalam satu paket.

5. Aspek sosial.
   - Keberhasilan pembangunan jaringan pipa air limbah perlu mendapat dukungan masyarakat. Proyek ini berhasil membangun kesadaran masyarakat mengenai perlunya pembangunan jaringan air limbah melalui *public campaign* yang dilakukan tidak saja dengan media resmi (koran, radio), tetapi juga melalui sosialisasi langsung ke masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, banjar/RT-RW, bahkan sosialisasi juga dilakukan "*Door to Door*" dengan melibatkan putra/putri atau aparat banjar/RT-RW setempat. Sosialisasi secara "Door to Door" dirasakan sangat efektif dalam menjalin pemahaman dari masyarakat, baik selama masa pelaksanaan konstruksi maupun untuk meningkatkan minat menjadi pelanggan (*willingness to connect*) dan minat untuk membayar retribusi (*willingness to pay*).

4. REPLIKASI PROYEK

Rural Empowerment and Agriculture Development (READ)

Proyek replikasi READ merupakan komitmen Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan berbagai pihak terkait untuk mereplikasikan pembelajaran dan pencapaian dari proyek READ yang dibiayai pinjaman luar negeri, yang sukses dilakukan di Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2015-2017 proyek replikasi READ dilakukan ke wilayah perbatasan, yaitu Propinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, dan Propinsi NTT yang berbatasan dengan Timor Leste.

Proyek replikasi ini bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat miskin perdesaan secara berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan kegiatan pertanian pada 13 desa sasaran di Propinsi Kalimantan Barat dan 17 desa sasaran di Propinsi NTT. Tujuan tersebut dicapai melalui pendampingan proses perencanaan dan pelaksanaan program, dengan didukung oleh kegiatan pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat.

Gambar 2.7 Perjalanan Menuju Desa Temajuk dan Kondisi di Lokasi Proyek

Secara umum, proyek replikasi READ memiliki empat komponen utama, yaitu: (i) pemberdayaan masyarakat; (ii) peningkatan mata pencaharian (pengembangan pertanian budidaya dan non budidaya); (iii) pengembangan infrastruktur perdesaan; (iV) manajamen dan supervisi.

Pada Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terdapat delapan desa sasaran dari proyek replikasi READ, yaitu Desa Kalimantan, Desa Malek, Desa Matang Danau, Desa Mentibar, Desa Nibung, Desa Sebubus, Desa Tanah Hitam dan Desa Temajuk. Pada setiap desa sasaran tersebut terdapat enam kelompok komoditas, yaitu padi-jagung, karet-lada, sayur-buah-buahan, kelapa-ubi kayu, ternak dan *non farm*. Setiap kelompok petani terdiri atas 15-25 orang dan memiliki 3 orang pengurus yang mengelola dana bergulir untuk dipinjamkan ke anggotanya. Modal awal dari dana bergulir yang diberikan pada setiap kelompok bervariasi antara Rp 10 – 25 juta, tergantung besarnya kelompok komoditas. Setiap desa sasaran dibantu oleh penyuluh pertanian untuk membantu penyelesaian permasalahan teknis pertanian, dan fasilitator desa membantu memfasilitasi pertemuan dalam kelompok komoditas serta memberikan pelatihan terkait administrasi di kelompok komoditas. Pelatihan-pelatihan pertanian juga dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian setempat.

Pembelajaran yang diperoleh dari proyek replikasi READ antara lain:

1. Model/desain program READ yang sebelumnya didanai dari pinjaman luar negeri ternyata dapat direplikasi dengan menggunakan Rupiah Murni. Meskipun menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan, seperti kontrak yang tidak bisa *multi years*. Namun dengan komitmen yang kuat, proyek dapat dijalankan dan memperoleh hasil yang baik.
2. Dukungan dari berbagai pihak, seperti kementerian teknis terkait, Camat, Kepala BPP, Kepala Desa, dan masyarakat secara umum sangat dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan dari proyek replikasi ini.
3. Pembangunan di daerah perbatasan masih sangat minim, karenanya perlu campur tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus memberikan dukungan bagi masyarakat dalam membangun daerah terluar atau daerah perbatasan.

HIBAH LUAR NEGERI

❖ PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Pemantauan terhadap pelaksanaan hibah luar negeri bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dapat muncul dalam pelaksanaan kegiatan, mencari solusi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Pemantauan juga dapat digunakan untuk memperoleh pembelajaran yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan maupun replikasi, serta *scaling up* kegiatan di masa mendatang.

Hibah luar negeri yang dipantau dan dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan I Tahun 2016 berjumlah 9 proyek, yang dilaksanakan oleh 2 Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri (berdasarkan Instansi Penanggung Jawab)

No	Kode Hibah - Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
1	2HKGZXVQ (UNDP)	Enhancing Protected Area System In Sulawesi (E-Pass) For Biodiversity Conservation	01/04/2015 s/d 31/03/2020	6.26
2	2007 66 089 (KfW)	Forest Programme	19/10/2010 s/d 30/12/2017	20
3	73703301 (UNDP)	National Biodiversity Planning To Support The Implementation of the CBD 2011-2020 Strategic Plan In Indonesian (NBSAP)	17/05/2013 s/d 31/06/2016	0.51
4	TA 8548-INO (ADB)	Sustainable Forest And Biodiversity Management In Borneo	Sept 2015 s/d Nov 2017	4.5
Kementerian PPN/Bappenas				
1	8548-INO (ADB)	Aligning Asian Development Bank And Country Systems for Improved Project Performance	19/06/2014 s/d 30/06/2017	1.5
2	72200201 (USAID)	Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact	02/04/2013 s/d 01/04/2018	600
3	8535-INO (ADB)	Support for Selected Sector Analysis for National Medium-Term Development Planning 2015-2019 on Asean Connectivity	06/12/2013 s/d 28/02/2016	0.23
4	9132-INO (ADB)	Rice Fortification for The Poor (RICE)	31/12/2009 s/d 30/04/2016	1.0
5	0013-INO (ADB)	Sustainable Infrastructure Assistance Program (SIAP)	17/06/2013 s/d 30/06/2019	17.4
Total Nilai Hibah				**651.4**

Pemanfaatan Hibah Luar Negeri diarahkan untuk mendukung penanganan lingkungan hidup dan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan juga peningkatan kapasitas (*capacity building*). Isu lingkungan hidup dan perubahan iklim merupakan isu global yang mempunyai dampak yang luas bukan semata-mata bagi suatu negara, namun berdampak pada seluruh dunia. Untuk itu, komitmen global dari negara-negara maju terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim semakin meningkat. Seiring dengan hal tersebut, maka sebagian besar hibah yang diterima Indonesia juga terkait dengan isu lingkungan dan perubahan iklim.

Dalam triwulan ini, terdapat 4 proyek hibah luar negeri yang fokus pada lingkungan hidup dan perubahan iklim yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan yang pertama adalah proyek *Forest Programme* yang ditujukan untuk menemukan cara terbaik (*best*

practices) terhadap pelaksanaan kegiatan percontohan REDD+ di tiga kabupaten di Kalimantan. Kedua, *Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo*, hibah ini memberikan kontribusi terhadap dampak dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hutan di Indonesia dengan memperkuat kapasitas manajemen sumber daya alam Pemerintah Indonesia. Dampak tersebut akan diukur dengan indikator-indikator perluasan tutupan hutan, peningkatan proporsi kayu yang dihasilkan dari hutan tanaman lestari, dan pengurangan emisi karbondioksida. Ketiga adalah proyek *Enhancing Protected Area System in Sulawesi (E-PASS) for Biodiversity Conservation,* proyek hibah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pendanaan bagi sistem kawasan konservasi di Sulawesi dalam merespon berbagai ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Terakhir, adalah proyek *National Biodiversity Planning to Support the Implementation of the CBD 2011-2020 Strategic Plan in Indonesia* (NBSAP), proyek hibah ini bertujuan untuk mengintegrasikan kewajiban Indonesia di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Deversity*/CBD) ke dalam kerangka kerja perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan sektoral sesuai dengan Rencana Strategis CBD tahun 2011-2020.

Di aspek lain, terdapat hibah *Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact* yang dikelola oleh Bappenas. Proyek hibah ini mempunyai kontribusi terhadap beberapa aspek yaitu pengentasan kemiskinan, kemakmuran hijau, dan juga peningkatan kapasitas dan reformasi di bidang pengadaan barang/jasa. Hibah-hibah lain yang dikelola oleh Bappenas, antara lain hibah *Aligning Asian Development Bank and Country Systems for Improved Project Performance*. Proyek hibah ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan penguatan persiapan proyek, serta harmonisasi *safeguard system* dan *procurement system* antara ADB dengan Pemerintah Indonesia. Selain itu, terdapat 3 proyek hibah lainnya, yaitu i) hibah *Support for Selected Sector Analysis for National Medium-Term Development Planning 2015-2019 on ASEAN Connectivity* yang bertujuan untuk mengharmonisasikan *international connectivity programs* dengan RPJMN 2015-2019, ii) hibah *Sustainable Infrastructure Assistance Program* yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kota, dan iii) hibah *Rice Fortification for the Poor* yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas produksi dan distribusi beras fortifikasi.

DAFTAR PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2016 BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
Badan Informasi Geospasial						**56,7**	**55,7**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1	IP-544	Jepang (JICA)	National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project	29/03/2007	26/07/2017	56,7	55,7	1,1	0,0	0,0	0,0
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan						**57,8**	**24,1**	**33,7**	**19,5**	**3,9**	**20,1**
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan											
2	2927-INO	ADB	Strengthening Accountability Revitalization Project (STAR)	19/02/2013	30/06/2018	57,8	24,1	33,7	19,5	3,9	20,1
Badan Pengusahaan Batam						**46,7**	**2,4**	**44,3**	**12,4**	**0,0**	**0,0**
3	INA-20	Korea	Development of Sewerage System in Batam Island Project	21/12/2014	29/06/2019	46,7	2,4	44,3	12,4	0,0	0,0
Badan Pusat Statistik						**47,0**	**2,9**	**44,1**	**12,1**	**0,6**	**4,8**
4	8038-ID	Bank Dunia	Statistical Capacity Building Change and Reform for the Development Statistic (Statcap-Cerdas)	18/07/2011	30/11/2018	47,0	2,9	44,1	12,1	0,6	4,8
Kementerian Agama						**128,4**	**0,2**	**128,2**	**13,7**	**0,0**	**0,2**
Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam											
5	IND-0158	IDB	The Development and Quality Improvement of State Intitute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel Project *)	28/11/2011	30/09/2016	4,6	0,1	4,5	4,4	0,0	0,6
6	IND-0164	IDB	The Support to Development of Islamic Higher Education Project (4 in 1)	18/05/2013	10/18/2018	123,8	0,1	123,7	9,3	0,0	0,0
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi						**513,2**	**250,8**	**262,4**	**129,9**	**7,7**	**5,9**
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
7	755-ID	IFAD	National Program for Community Empowerment in Rural Areas (IFAD Support to PNPM)	17/03/2009	31/03/2018	63,2	56,4	6,8	0,4	0,0	0,0

Keterangan :
**) Loan IND-0157 telah closing pada TW I 2016*

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
8	8217-ID	Bank Dunia	National Program for Community Empowerment in Rural Areas (PNPM Rural) 2012-2015	22/03/2013	31/12/2016	450,0	194,4	255,6	129,5	7,7	5,9
Kementerian Kelautan dan Perikanan						**166,9**	**68,9**	**98,0**	**25,5**	**0,8**	**3,2**
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil											
9	8336-ID	Bank Dunia	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	05/06/2014	30/06/2019	57,4	8,5	48,8	9,9	0,5	5,2
	3094-INO	ADB	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	24/02/2014	30/06/2019	45,5	9,1	36,5	9,7	0,0	0,0
10	880-ID	IFAD	Coastal Community Development Project (CCDP)	01/11/2012	01/11/2018	34,0	27,0	7,0	1,7	0,3	18,1
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											
11	CID 1025 01 C	Perancis (AFD)	Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO)	18/06/2012	13/12/2016	30,0	24,4	5,6	4,2	0,0	0,0
Kementerian Ketenagakerjaan						**32,5**	**0,1**	**32,4**	**27,5**	**0,1**	**0,3**
Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas											
12	IND-0159,0160	IDB	Support to Quality Improvement of The Vocational Training Centers (VTC) Project	23/12/2013	23/12/2017	32,5	0,1	32,4	27,5	0,1	0,3
Kementerian Komunikasi dan Informatika						**54,5**	**23,0**	**31,5**	**23,0**	**0,0**	**0,0**
Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika											
13	21686401	Perancis	Improvement on TV Transmitting Stations (ITTS) - Phase II	31/12/2014	13/12/2018	54,5	23,0	31,5	23,0	0,0	0,0
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						**3.941,5**	**2.163,9**	**1.777,5**	**547,0**	**53,5**	**9,8**
Direktorat Jenderal Bina Marga											
14	IP-545	Jepang (JICA)	Aceh Reconstruction Project	29/03/2007	26/07/2017	103,2	63,5	39,7	8,2	2,2	26,9
15	21662601	RR Tiongkok	Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road	12/11/2012	28/08/2017	93,0	58,3	34,7	21,3	0,0	0,0
16	INA-17	Korea	Padang By-Pass Capacity Expansion Project	14/04/2011	14/08/2017	58,6	21,0	37,6	11,7	2,3	19,4

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
17	2817-INO	ADB	Regional Road Development Project (RRDP)	31/07/2012	31/07/2018	180,0	50,2	129,8	32,7	2,0	6,2
	IND-0161	IDB	Regional Road Development Project (RRDP)	29/04/2013	29/04/2017	65,0	7,2	57,8	11,5	0,5	4,0
18	IP-529	Jepang (JICA)	Tanjung Priok Acces Road Construction Project I	28/07/2005	30/12/2016	234,2	133,8	100,4	7,5	0,0	0,0
19	IP-531	Jepang (JICA)	Tanjung Priok Acces Road Construction Project II	01/04/2006	26/12/2016	237,0	180,4	56,6	15,1	2,8	18,4
20	21660201	RR Tiongkok	Tayan Bridge Construction	04/09/2012	08/05/2016	67,3	56,3	11,0	0,0	0,0	0,0
21	21663301	RR Tiongkok	Toll Road Development of Medan - Kualanamu	11/03/2013	11/03/2018	122,4	33,8	88,6	24,4	0,3	1,3
22	8043-ID	Bank Dunia	Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP)	12/03/2012	31/12/2017	250,0	51,8	198,2	58,0	3,5	6,1
Direktorat Jenderal Cipta Karya											
23	8259-ID	Bank Dunia	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	02/08/2013	31/12/2016	99,9	68,1	31,8	15,1	0,0	0,0
24	IP-550	Jepang (JICA)	Denpasar Sewerage Development Project II	25/07/2008	25/07/2016	53,4	50,9	2,5	1,5	0,2	10,8
25	2010 66 471	Jerman (KfW)	Emission Reduction in Cities : Solid Waste Management	02/05/2013	30/06/2018	85,2	0,5	84,7	2,1	0,0	0,0
26	2654-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	22/11/2010	30/10/2016	35,0	20,6	14,4	9,5	0,0	0,0
27	IP-565	Jepang (JICA)	Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta	23/06/2014	23/06/2021	17,5	0,0	17,5	1,1	0,0	0,0
28	3123-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09/07/2014	31/12/2020	80,0	0,0	80,0	20,7	0,0	0,0
	8280-INO	AIF	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09/07/2014	31/12/2020	40,0	0,0	40,0	4,1	0,0	0,0
29	8213-ID	Bank Dunia	National Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM Urban) 2012-2015	01/03/2013	31/12/2016	266,0	218,7	47,3	35,3	1,3	3,7
30	3122-INO	ADB	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)	17/07/2014	30/06/2018	74,4	8,4	66,0	31,9	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
31	IND-0169	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	30/09/2016	187,0	152,0	35,0	25,7	16,7	64,9
	IND-0170	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	30/09/2016	8,0	4,5	3,5	1,8	2,0	114,3
	IND-0171	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	30/09/2016	10,0	6,3	3,7	1,6	2,0	124,2
32	IP-564	Jepang (JICA)	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II)	24/02/2014	23/06/2019	89,3	83,0	6,3	4,5	0,4	9,3
33	IND-0167	IDB	SANIMAS Comunity-Based Sanitation Project In Indonesia	29/10/2014	31/12/2018	100,0	4,9	95,1	19,5	0,0	0,0
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air											
34	21595701-31	RR Tiongkok	Additional Loan for Jatigede Dam	03/09/2013	03/09/2016	117,0	104,9	12,1	1,9	0,0	0,0
35	INA-19	Korea	Construction of Karian Multipurpose Dam Project	14/02/2012	22/03/2019	97,2	13,0	84,2	15,4	1,0	6,7
36	IP-552	Jepang (JICA)	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir I	28/07/2009	28/07/2018	53,9	33,7	20,2	5,2	1,6	30,8
37	IP-567	Jepang (JICA)	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II	23/06/2014	23/06/2021	44,1	0,0	44,1	7,1	0,0	0,0
38	7669-ID	Bank Dunia	Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)	08/06/2009	31/12/2016	50,0	41,9	8,1	4,2	0,0	0,1
39	IP-547	Jepang (JICA)	Decentralized Irrigation System Improvement Project	25/07/2008	25/07/2016	79,8	74,4	5,4	2,1	1,5	69,3
40	2500-INO	ADB	Integrated Citarum Water Resources Management and Invesment Program (ICWRMIP)	03/06/2009	31/05/2016	20,0	12,0	8,0	4,6	0,0	0,0
	2501-INO	ADB	Integrated Citarum Water Resources Management and Invesment Program (ICWRMIP)	03/06/2009	31/05/2016	30,9	22,1	8,8	4,0	0,3	8,5
41	IP-534	Jepang (JICA)	Integrated Water Resources & Flood Management	26/07/2006	26/07/2016	145,1	134,1	11,0	6,1	2,6	43,2
42	8121-ID	Bank Dunia	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	08/08/2012	31/03/2017	139,6	43,1	96,6	32,7	1,8	5,5
43	IP-523	Jepang (JICA)	Komering Irrigation Project Stage Phase II	28/07/2005	27/01/2016	122,8	122,5	0,3	0,0	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
44	IP-522	Jepang (JICA)	Lower Solo River Improvement Project II	28/07/2005	30/09/2017	83,2	70,1	13,1	2,6	0,9	34,1
45	IP-546	Jepang (JICA)	Participatory Irrigation System Improvement Project	25/07/2008	25/07/2016	109,6	101,5	8,0	6,4	2,0	30,9
46	IP-559	Jepang (JICA)	Upper Citarum Basin Flood Management	28/03/2013	25/07/2020	29,5	0,6	28,8	5,7	0,6	11,2
47	IP-551	Jepang (JICA)	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	28/07/2009	28/07/2017	66,7	40,5	26,2	13,6	1,7	12,5
48	IP-566	Jepang (JICA)	Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area - Phase II	24/02/2014	24/02/2018	45,5	5,7	39,8	12,9	1,9	14,6
49	8027-ID	Bank Dunia	Water Resources and Irrigation Sector Management (WISMP II)	14/11/2011	31/12/2018	150,0	69,4	80,6	57,9	1,4	2,4
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan						**21,6**	**9,4**	**12,1**	**2,1**	**0,0**	**0,0**
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah											
50	2007 66 071	Jerman (KfW)	Sustainable Economic Development Through Technical and Vocational Education and Training	15/12/2011	15/12/2016	21,6	9,4	12,1	2,1	0,0	0,0
Kementerian Perhubungan						**620,0**	**130,5**	**489,5**	**111,0**	**0,1**	**0,1**
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut											
51	IND-0133	IDB	The Development of Belawan Port Project Phase I	01/05/2010	05/04/2017	87,6	1,2	86,4	25,6	0,1	0,5
Direktorat Jenderal Perkeretaapian											
52	21671901	Perancis (NATIXIS)	Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line	04/06/2013	30/06/2018	90,9	0,0	90,9	1,6	0,0	0,0
	CID 1029 01G	Perancis (AFD)	Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line	04/06/2013	31/03/2018	51,7	0,0	51,7	1,0	0,0	0,0
53	IP-563	Jepang (JICA)	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement-Phase I	24/02/2014	20/02/2020	145,3	0,0	145,3	0,0	0,0	0,0
54	IP-508	Jepang (JICA)	Railway Electrification and Double Double Tracking Project I	13/12/2001	11/09/2016	207,6	104,5	103,1	82,2	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
55	2005 66 612	Jerman (KfW)	Track Maintenance Improvement Programme	22/12/2009	30/06/2016	36,9	24,9	12,1	0,7	0,0	0,0
Kementerian Pertanian						**127,9**	**50,1**	**77,8**	**34,6**	**0,9**	**2,7**
Badan Ketahanan Pangan											
56	835-ID	IFAD	Smallholder Livelihood of Development In Eastern Indonesia (SOLID)	06/07/2011	31/07/2019	47,9	24,5	23,5	18,8	0,0	0,1
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian											
57	8188-ID	Bank Dunia	Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMART-D)	25/10/2012	30/09/2017	80,0	25,6	54,4	15,8	0,9	5,9
Kementerian PPN/Bappenas						**175,6**	**82,3**	**93,3**	**29,7**	**4,5**	**15,1**
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana											
58	IP-568	Jepang (JICA)	Profesional Human Resources Development IV	25/04/2014	25/04/2023	63,0	12,0	51,0	8,4	2,7	32,6
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas											
59	8010-ID	Bank Dunia	Scholarships Program for Strengthening Reforming Institution (SPIRIT)	16/06/2011	31/12/2017	112,7	70,3	42,4	21,3	1,8	8,3
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi						**829,9**	**246,7**	**583,2**	**164,6**	**22,1**	**13,4**
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi											
60	IP-553	Jepang (JICA)	Development of Bandung Institute of Technology III	28/07/2009	30/09/2018	50,4	24,9	25,5	8,2	1,6	19,1
61	IP-549	Jepang (JICA)	Development of World Class University at University of Indonesia	25/07/2008	15/07/2018	130,3	63,7	66,6	28,7	4,0	13,9
62	IP-541	Jepang (JICA)	Hasanuddin University Engineering Faculty Development	26/07/2007	26/07/2016	69,4	52,5	17,0	8,0	1,8	22,6
63	2928-INO	ADB	Polytechnic Education Development Project	07/02/2013	30/06/2018	75,0	23,9	51,1	18,5	7,8	42,2
64	IND-0152	IDB	The Development and Quality Improvement of Semarang State University (UNNES) Project	28/11/2011	31/12/2016	3,4	2,1	1,2	0,7	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
	IND-0153	IDB	The Development and Quality Improvement of Semarang State University (UNNES) Project	28/11/2011	31/12/2016	25,7	13,5	12,2	13,8	0,1	0,5
	IND-0154	IDB	The Development and Quality Improvement of Semarang State University (UNNES) Project	28/11/2011	31/05/2016	6,9	0,5	6,4	5,3	0,4	7,2
65	IND-0137	IDB	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	26/02/2011	31/12/2016	31,3	7,6	23,7	7,2	1,3	18,7
	IND-0138	IDB	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	26/02/2011	31/12/2016	32,7	0,1	32,6	12,0	0,0	0,0
	SFD/8/526	Saudi Fund	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	28/11/2010	01/01/2017	36,0	16,3	19,7	1,5	0,0	0,0
66	IND-0140	IDB	The Quality Improvement of Padjadjaran University Project	24/07/2011	31/10/2017	27,0	20,3	6,7	6,3	1,1	17,4
	IND-0141	IDB	The Quality Improvement of Padjadjaran University Project	24/07/2011	31/05/2016	8,2	2,6	5,7	2,0	2,0	98,4
67	IND-0155	IDB	The Reconstruction and Upgrading of The State University of Padang (UNP) Project	28/11/2011	31/12/2016	24,6	6,5	18,1	18,0	0,7	3,6
	IND-0156	IDB	The Reconstruction and Upgrading of The State University of Padang (UNP) Project	28/11/2011	31/12/2016	4,9	0,1	4,9	3,5	0,0	0,0
68	IND-0168	IDB	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	14/04/2014	31/12/2017	174,0	0,2	173,9	3,7	0,1	2,1
	SFD/9/612	Saudi Fund	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	15/09/2014	31/12/2018	35,0	0,0	35,0	0,7	0,0	0,0
Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi											
69	8245-ID	Bank Dunia	Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro)	12/06/2013	31/12/2020	95,0	12,0	83,0	26,5	1,3	5,0
Kepolisian Republik Indonesia						**70,0**	**0,6**	**69,4**	**31,3**	**0,0**	**0,0**
70	INA-21	Korea	Fast Patrol Boats for Indonesian National Police	21/03/2014	21/01/2018	32,7	0,2	32,5	14,7	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
71	INA-18	Korea	Integrated Trunking Radio Communication for Indonesian National Police	14/02/2012	22/11/2018	37,3	0,4	36,9	16,7	0,0	0,0
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia						**16,7**	**10,5**	**6,2**	**5,7**	**0,0**	**0,0**
72	LA 15.04.2011	Spanyol	Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production	20/10/2011	31/07/2016	16,7	10,5	6,2	5,7	0,0	0,0
PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)						**4,6**	**1,7**	**2,9**	**1,2**	**0,0**	**0,0**
73	8192-ID	Bank Dunia	Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)	12/06/2013	31/03/2018	4,6	1,7	2,9	1,2	0,0	0,0
PT. PERTAMINA						**540,1**	**88,2**	**451,9**	**193,7**	**6,8**	**3,5**
74	8082-ID	Bank Dunia	Geothermal Clean Energy Investment Project	29/06/2012	31/12/2018	300,0	65,5	234,5	136,6	5,6	4,1
75	IP-557	Jepang (JICA)	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	25/10/2011	25/10/2019	240,1	22,7	217,3	57,1	1,2	2,1
PT. PLN						**2.811,1**	**459,2**	**2.351,9**	**293,6**	**16,6**	**5,6**
76	IP-532	Jepang (JICA)	Asahan Hydroelectric Power Plant III	15/05/2008	15/05/2017	246,1	9,4	236,7	11,3	0,0	0,0
77	IP-555	Jepang (JICA)	Engineering Services for Java-Sumatra Interconnection	31/03/2010	31/03/2019	34,6	12,6	22,0	4,5	0,0	0,0
78	7940-ID	Bank Dunia	Indonesia Power Transmission Development Project (PTD I)	30/05/2011	31/12/2016	225,0	92,5	132,5	44,2	4,4	10,0
79	IP-561	Jepang (JICA)	Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)	28/03/2013	28/03/2022	15,4	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0
80	3083-INO	ADB	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29/09/2014	30/09/2019	224,0	0,2	223,8	4,3	0,0	0,0
	8276-INO	AIF	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29/09/2014	30/09/2019	25,0	0,0	25,0	0,4	0,0	0,0
81	IP-556	Jepang (JICA)	Java-Sumatera Interconnection Transmission Line Project	26/03/2013	30/04/2019	329,3	15,2	314,1	109,7	0,0	0,0
82	IP-539	Jepang (JICA)	North-West Sumatera Inter-Connector Transmission	26/01/2009	26/01/2017	143,5	81,1	62,4	4,7	1,7	37,1
83	21661901	RR Tiongkok	Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project	26/03/2013	28/04/2017	132,2	50,2	81,9	17,8	5,8	32,7

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan I TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
84	IP-538	Jepang (JICA)	Peusangan Hydroelectric PP Construction Project	26/01/2009	26/01/2019	231,6	100,4	131,2	26,5	3,3	12,5
85	IP-537	Jepang (JICA)	PLN Operation Improvement System for Supporting Generation Facilities	26/01/2009	26/01/2018	40,0	2,5	37,5	0,0	0,0	0,0
86	26180	Jerman (KfW)	Scattered Transmission & Substation Project (P. 3)	05/12/2014	30/09/2017	17,8	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0
	CID 1039 01H	Perancis (AFD)	Scattered Transmission & Substation Project (P. 7)	25/07/2014	25/11/2016	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	28221000	JBIC	Scattered Transmission & Substation Project (P. 8)	19/11/2012	30/06/2017	17,1	0,0	17,1	1,7	0,0	0,0
87	8280-ID	Bank Dunia	Scattered Transmission Line and Substation in Indonesia Phase II (IPTD II)	26/03/2014	31/12/2018	325,0	4,2	320,8	0,0	0,0	0,0
88	CID 1024 01B	Perancis (AFD)	Strengthening West Kalimantan Power Grid	08/02/2013	31/01/2016	49,5	33,8	15,7	5,8	0,0	0,0
	3015-INO	ADB	West Kalimantan Power Grid Strengthening Project	04/04/2014	31/07/2016	49,5	25,7	23,8	1,7	1,2	69,9
89	IP-560	Jepang (JICA)	Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)	28/03/2013	28/03/2022	45,4	1,2	44,2	11,3	0,0	0,0
90	8057-ID	Bank Dunia	Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1.040 MW)	01/05/2012	31/12/2018	640,0	30,0	610,0	49,7	0,1	0,2
PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)						**100,0**	**99,9**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
91	7731-ID	Bank Dunia	Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF)	25/04/2011	30/11/2016	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	0,0
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta						**428,6**	**272,9**	**155,7**	**200,2**	**9,2**	**4,6**
92	IP-554	Jepang (JICA)	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project	28/07/2009	28/07/2019	428,6	272,9	155,7	200,2	9,2	4,6
Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing (LPKE/KSA)						**4.527,0**	**3.222,4**	**1.304,6**	**578,4**	**208,9**	**36,1**
Total						**15.318,2**	**7.266,5**	**8.051,6**	**2.456,5**	**335,6**	**13,7**